

Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Koperasi Unit Desa Yosowilangun Lumajang

Muhammad Abu Yasit¹, H.M. Yahdi², Wahyuning Murniati³

STIE Widya Gama Lumajang
Email: abuyazid58@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Volume 3
Nomor 3
Bulan Maret
Tahun 2021
Halaman 150-162

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada koperasi unit desa yosowilangun lumajang. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada KUD Sri Tanjung dinilai dari salah satu syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali belum berjalan dengan cukup baik. Efisiensi pengendalian biaya yang dilakukan oleh KUD Sri Tanjung berdasarkan laporan realisasi anggaran juga belum dikatakan efisien karena dalam penyusunan anggaran masih terdapat beberapa realisasi yang melebihi anggaran, dan bahkan hampir disemua unit terdapat selisih yang tidak menguntungkan (unfavorable). Agar pengendalian biaya dapat dikatakan efisien maka dalam penyusunan anggaran perlu dioptimalkan sehingga tidak terjadi selisih yang tidak menguntungkan (unfavorable), dan realisasi yang dikeluarkan dapat disesuaikan dengan anggaran yang telah direncanakan.

Kata Kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban, Pusat Pertanggungjawaban, Anggaran, Pengendalian biaya.

ABSTRACT

This research was conducted to find out the analysis of the application of responsibility accounting as a cost control tool in the village unit of Yosowilangun Lumajang. The results showed that based on the application of responsibility accounting in KUD Sri Tanjung assessed from one of the requirements of accountability accounting, namely the separation of controlled costs and uncontrolled costs has not been going well enough. The efficiency of cost control conducted by KUD Sri Tanjung based on the report on budget realization has also not been said to be efficient because in the preparation of the budget there are still a number of realizations that exceed the budget, and even in almost all units there are unfavorable differences. So that cost control can be said to be efficient then in the preparation of the budget needs to be optimized so that the difference does not occur unfavorable (unfavorable), and the realization issued can be adjusted to the planned budget.

Keywords: Responsibility Accounting, Responsibility Center, Budget, Cost Control

PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri dari atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi (Hendrojogi, 2012). Peran penting KUD bagi masyarakat seperti terbentuknya

program pemerintah mengenai perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Program dari pemerintah dibangun untuk masyarakat desa berupa pengadaan pangan, distribusi benih dan pupuk yang sekarang dilakukan melalui KUD.

Rudianto (2010:3), koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Menurut Hendar (2010: 2), koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Menurut Revrisond Baswir (2013: 21), koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.

Berhasil tidaknya realisasi anggaran KUD sangat berpengaruh terhadap anggotanya, sehingga KUD dituntut untuk lebih maksimal dalam mengolahnya, khususnya dalam segi keuangan yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangannya. Melalui laporan keuangan dapat diketahui sejauh mana potensi prestasi dan kondisi keuangan yang dimiliki KUD tersebut. Maka dari itu dalam pengembangan KUD diperlukan adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam membantu mendelegasikan wewenang tanggung jawaban yang ada.

Di Indonesia pertumbuhan dan persaingan badan usaha semakin meningkat, sehingga perusahaan harus mencari metode pengendalian agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Prinsip Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Koperasi perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban guna menunjang pengendalian biaya, semakin baik penerapan akuntansi pertanggungjawabannya pada Koperasi maka semakin baik pula pengendalian biaya, sedangkan pengendalian biaya yang baik akan memudahkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Tanggung jawab yang diminta tiap departemen terhadap manajer pusat pertanggungjawaban adalah tanggungjawab atas biaya yang dapat mereka kendalikan secara langsung. Dengan demikian, manajer tiap pusat pertanggungjawaban tersebut dapat mengidentifikasi pendapatan dan biaya yang berada dibawah pengawasannya dan tidak berada dibawah pengawasannya. Hanya biaya dan pendapatan yang terkendali saja yang menjadi tanggungjawab tiap manajer pusat pertanggungjawaban. Daljano (2009:21) menyatakan bahwa "Biaya terkendali adalah biaya dimana manajer dapat mempengaruhi ada tidaknya dan besar kecilnya biaya tersebut. Apabila seorang manajer tidak dapat mempengaruhi suatu biaya memenuhi kebijakannya, maka biaya tersebut merupakan biaya tak terkendali bagi manajer tersebut". Dalam akuntansi pertanggungjawaban, biaya dan pendapatan dikumpulkan dan dilaporkan untuk setiap jenjang manajemen. Agar dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan suatu bagan perkiraan yang diberi kode tertentu yang memuat perkiraan-perkiraan yang ada di neraca maupun pada perhitungan labarugi. Proses ini mengakibatkan setiap tingkatan manajemen atau setiap bagian dalam perusahaan yang merupakan pusat pertanggungjawaban akan dibebani dengan biaya yang terjadi di dalamnya. Biaya tersebut harus dipisahkan menjadi biaya terkendali dan tidak terkendali berdasarkan kepentingannya di dalam laporan keuangan dan dalam persiapan pembuatan laporan (Putri, 2005).

Salah satu sistem akuntansi yang menggabungkan aset, biaya, dan pendapatan yang diakukan sesuai bidang pertanggungjawaban di dalam perusahaan ialah akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian biaya atau pelaporan biaya dalam suatu perusahaan yang di pertanggungjawabkan. Tujuannya pertanggungjawaban agar ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan aset, biaya, dan pendapatan yang dianggarkan (Mulyadi, 1997).

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat tanggungjawab pada keseluruhan organisasi, dan mencerminkan rencana serta tindakan setiap pusat tanggungjawab itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggungjawab bersangkutan (Rudianto 2013:176). dan hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak manajemen. Sebenarnya kaitan antara akuntansi pertanggungjawaban dengan pengendalian biaya terletak pada fungsi pengendaliannya, dalam hal ini adalah faktor manusianya. Hal ini disebabkan karena manusia adalah subjek yang melakukan aktivitas-aktivitas perusahaan sekaligus pemegang peranan yang penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pengendalian biaya di perusahaan tersebut. Pentingnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban guna mendapatkan informasi, khususnya informasi mengenai pengendalian biaya. Dalam akuntansi pertanggungjawaban untuk melakukan pengendalian biaya dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan suatu anggaran dalam sistem pencatatan biaya-biaya tersebut akan menghasilkan laporan biaya yang dapat menunjukkan kinerja manajer dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pada biaya-biaya yang terjadi di dalam usahanya. Hansen (2009:229) menyatakan "Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui empat elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan memengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama."

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sangat penting dikarenakan mampu membantu manajemen pusat pertanggungjawaban dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengendalian biaya dan dapat

digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai pengendalian biaya yang ada, sehingga pada akhirnya suatu tujuan dapat tercapai. Jika penerapan akuntansi pertanggung jawaban semakin baik, maka pengendalian biaya juga akan semakin baik. Sedangkan jika pengendalian biaya dilakukan dengan baik, maka dapat memudahkan dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban untuk pencapaian suatu tujuan.

Pusat pertanggungjawaban digunakan untuk menunjukkan unit organisasi yang di kelola oleh seorang manajer yang bertanggungjawab. Pengumpulan dan pelaporan biaya didasarkan pada masing-masing bidang pertanggungjawaban yang ada dalam tingkat organisasi. Oleh karena itu, harus ditetapkan bidang pertanggungjawaban dari setiap tngkatan manajemen yang disebutkan pusat pertanggungjawaban. "Pusat pertanggungjawaban (responsibility) merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu" (Hansen dan Mowen, 2009:560) "Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi didalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab" (Mulyadi, 2005:398). Horngren (2008:231) menyatakan pusat pertanggungjawaban adalah "Bagian, Segmen, atau sub unit dari organisasi dimana managernya bertanggungjawab atas segenap aktivitas tertentu. Semakin tinggi tingkatan manajer, semakin luas pusat pertanggungjawabannya dan secara umum, semakin banyak jumlah bawahannya".

Didalam akuntansi pertanggungjawaban terdapat informasi yang penting dengan proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan atau biaya yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan/atau biaya tersebut menurut manajer yang bertanggungjawab (Mulyadi, 2002). "Pengendalian (controll) adalah proses menetapkan standar , memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana" (Siregar dkk, 2013:113). Dengan demikian peranan pengendalian ini sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Doyle (2001:27) yang dikutip dari Athena (2010) mengemukakan bahwa "Pengendalian adalah suatu proses untuk menetapkan apa yang sudah dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula". Harahap (2009:234) menyatakan "Analisis variansi adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggarannya". Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu selisih dapat dianggap menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dari analisis variansi ini diselidiki penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasi terjadinya selisih terutama selisih yang merugikan.

KUD Sri Tanjung adalah sebuah Koperasi Unit Desa yang terletak di desa Krai Kecamatan Yosowilangun. KUD Sri Tanjung memiliki 9 bidang unit usaha, yang terdiri dari Unit Aneka Usaha, Unit Penggilingan Padi, Unit Tebu Rakyat, Unit Angkutan, Unit Simpan Pinjam, Unit PLN, Unit Waserda, Unit Pupuk, dan Unit Umum. KUD Sri Tanjung Krai Kecamatan Yosowilangun merupakan usaha yang memasok kebutuhan bagi masyarakat. Selain unit usaha yang mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk dapat memasok kebutuhan barang. Karena itu untuk melakukan kegiatan operasional secara efisien dan efektif, sehingga diperlukan pengawasan dan pengelolaan bagi biaya operasional

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif, dengan objek penelitiannya adalah Koperasi di Koperasi Unit Desa Yosowilangun Lumajang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, dalam bentuk publikasi (Suryani dan Hendryadi, 2015:171). Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer, yakni dengan sumber perolehan data secara langsung dari jajaran pimpinan KUD Sri Tanjung melalui observasi, dan data sekunder dari laporan keuangan tahunan dan data informasi mengenai KUD Sri Tanjung. Metode pengumpulan data adalah Dokumentasi dan Wawancara. Dokumen yang digunakan berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip seperti profil perusahaan, struktur organisasi, laporan pertanggungjawaban, susunan karyawan, susunan pengurus dan pengawas organisasi beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing dan sebagainya, sata-data tersebut biasanya telah tersedia dilokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka hasil analisis berikut :

Menurut Hasibuan (2010:128) struktur organisasi adalah suatu gambaran yang menjelaskan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, jenis wewenang pejabat, bidan dan hubungan pekerjaan , garis perintah, tanggung jawab, rentang kendali serta sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi sangat diperlukan untuk membuat suatu lembaga organisasi terstruktur dan terorganisir serta mengetahui dengan jelas deskripsi tugas dan kewajiban masing-masing anggota yang harus dijalankan dalam suatu organisasi yang disusun untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi KUD Sri Tanjung secara jelas telah menggambarkan jenjang wewenang, tanggung jawab, tugas dan kewajiban setiap tingkatan manajemen dengan baik. Perusahaan juga telah merumuskan dengan jelas fungsi-fungsi pokok, tugas dan tanggung jawab unit kerja.

Rudianto (2013:64) menyatakan "Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis". Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan juga sebagai alat pengendalian. Suatu pengendalian biaya yang efektif ditunjang dengan adanya anggaran yang disusun sesuai dengan tingkat manajemen dalam organisasi. Dengan adanya susunan organisasi yang memiliki pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, perusahaan dapat menetapkan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan dalam anggaran. KUD Sri Tanjung telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran tahunan. Pertanggungjawaban tiap pusat pertanggungjawaban dilakukan oleh masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban yang nantinya akan melaporkan anggaran dan realisasi yang terjadi pada setiap pusat pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban pada KUD Sri Tanjung Krai Kecamatan Yosowilangun ini berisi mengenai biaya biaya yang di anggarakan, biaya yang selisihnya.

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Unit Usaha KUD Sri Tanjung Tahun 2019

Uraian	TAHUN 2019			
	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Unit Pengadaan Pangan	(4.346.750)	1.530.000	2.816.750	-
Unit Tebu Rakyat	90.091.820	107.333.590	(17.241.770)	83,94
Unit Saprotan	5.984.628	4.575.000	1.409.628	
Kredit usaha tani	229.700	0	229.700	-
Unit Simpan Pinjam	26.167.353	36.870.000	(10.702.647)	70,97
RMU/Penggilingan	(258.050)	675.000	(416.950)	130,81
Unit Angkutan	38.899.244	22.855.000	16.034.244	170,20
Unit Waserda/Pertokoan	10.306.000	9.975.000	331.000	103,32
Unit Jarek/Listrik	17.720.062	22.924.000	(5.203.938)	75,30
Unit Pelayanan Jasa Alsintal	83.804.871	51.780.000	32.024.871	-
Kelembagaan, Organisasi, & Operasional Kantor	220.080.000	189.735.815	30.344.185	86,21
Unit Aneka Usaha	9.364.360	3.015.753	6.348.605	

Berdasarkan tabel 1 data perbandingan anggaran dan realisasi pada KUD Sri Tanjung untuk periode tahun 2019 diatas, berikut hasil analisis data dan penjelasan biaya tersebut yaitu:

Tabel 2 Rencana Pendapatan Belanja Tahun 2020 Unit Usaha Pengadaan Pangan

No	URAIAN	TAHUN 2019		%
		RENCANA	REALISASI	
1.	PENDAPATAN :			0,00
	Penjualan ke Bulog	-	-	
	Penjualan ke pasar umum	121.200.000	-	
	Lain-lain	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	121.200.000	-	0,00
		107.550.000	-	0,00

2.	HPP			
3.	BEBAN/BIAYA :	-	-	-
Beban bunga	12.000.000	-	0,00	
Beban gaji/pekerja	-	-	-	
Beban pengemas	120.000	-	0,00	
Beban transportasi/Perjalanan dinas	-	-	-	
Beban angkutan	-	-	-	
Kelancaran usaha	-	-	-	
Alat tulis kantor	-	-	-	
Pajak/penyusutan				
JUMLAH BIAYA	12.120.000	-	0,00	
LABA BERSIH	1.530.000	-	0,00	

Biaya pada unit usaha pengadaan tahun 2019 menunjukkan realisasi sebesar Rp (4.346.750), dari anggaran sebesar Rp 1.530.0000, dan selisih sebesar Rp 5.876.750 dengan presentase 0 %. Hal ini dikarenakan tidak berjalan dengan baik pelaksanaan kegiatan pembelian, processing dan lainnya, dan adanya faktor RMU yang tidak melaksanakan kegiatannya karena faktor mesin penggiling padi yang sudah tua maka unit usaha pangan juga tidak dapat beroperasi dengan baik, sehingga unit ini tidak meningkatkan kinerja KUD dalam mengelolah laporan realisasi anggaran dan tidak menguntungkan bagi KUD

Tabel 3 Rencana Pendapatan Belanja Tahun 2020 Unit Usaha Tebu Rakyat

NO	URAIAN	TAHUN 2019		%
		RENCANA	REALISASI	
1.	PENDAPATAN :			
	Tebang Muat TR	1.000.085.000	634.258.990	62,92
	Fee dan Administrasi	76.594.970	64.094.884	83,68
	Pendapatan Jasa	36.000.000	53.772.506	149,37
	Lain-lain(Bank Bunga)	3.000.000	5.003.452	166,78
	JUMLAH PENDAPATAN	1.23.679.970	757.129.832	67,38
2.	BEBAN/BIAYA :			
	Beban Terbang Muat TR	852.995.000	554.370.670	64,99
	Gaji Karyawan	45.000.000	31.490.000	69,98
	Transport/Perjalanan Dinas	17.000.000	14.579.000	85,76
	Alat Tulis Kantor	18.000.000	3.016.561	16,76
	Kelancaran Usaha	46.000.000	29.952.000	65,11
	Rapat Pembinaan	5.000.000	-	0,00
	Pajak	600.000	178.500	29,75
	Perawatan Investasi/penyusutan	1.000.000	-	0,00
	Bunga	29.251.380	32.500.088	111,11
	Rekening Bank	1.500.000	623.300	41,55
		1.016.346.380	666.710.119	65,60
	JUMLAH BIAYA			
3.	LABA BERSIH	107.333.590	90.419.713	84,24

Biaya pada unit usaha tebu rakyat tahun 2019 menunjukkan realisasi sebesar Rp 107.333.590, dari anggaran sebesar Rp 90.091.820, dan selisih sebesar Rp (17.241.770) dengan presentase 84,25 %. Pada unit ini pelayanan kepada anggota terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas. Pelaksanaan tebang muat dan angkut , berajalan cukup lancar . Dengan hal ini pendapatan dan beban biaya realisasi tidak melebihi anggaran.

Tabel 4 Rencana Pendapatan Belanja Tahun 2020 Unit Usaha RMU/Penggilingan

NO	URAIAN	TAHUN 2019		%
		RENCANA	REALISASI	
1.	PENDAPATAN :			
	Ongkos giling	850.000	-	0,00
	Penjualan katul	1.200.000	-	0,00
	Penjualan sekam	400.000	-	0,00
	<u>Lain-lain</u>	=	=	=
	JUMLAH PENDAPATAN	2.450.000	-	0,00
	BEBAN/BIAYA :			
	Bahan bakar solar	325.000	-	0,00
	Pelumas	50.000	-	0,00
	Suku cadang	100.000	-	0,00
	Perbaikan/Perawatan	-	-	-
	Gaji karyawan	-	-	-
	Honor operator	300.000	-	0,00
	Penyusutan	1.000.000	-	0,00
	<u>Lain-lain</u>	=	=	=
	JUMLAH BIAYA	1.775.000	-	0,00
3.	LABA BERSIH	675.000	-	0,00

Biaya pada unit usaha RMU/Penggilingan tahun 2019 menunjukkan realisasi sebesar Rp 675.000, dari anggaran sebesar Rp (258.000), dan selisih sebesar Rp (416.950) dengan presentase 0 %. Pada tahun 2019 faktor mesin kondisinya cukup tua dan kemampuan besaing dibidang usaha pangan belum dikerjakan.

Tabel 5 Rencana Pendapatan Belanja Tahun 2020 Unit Usaha Semprotan

NO	URAIAN	TAHUN 2019		%
		RENCANA	REALISASI	
1.	PENDAPATAN :			
	Penjualan pupuk	359.637.000	273.849.740	76,14
	Jasa usaha	4.500.000	9.000.000.000	200,00
	<u>Lain-lain</u>	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	364.173.000	282.849.740	77,67
2.	HPP	344.000.000	263.015.470	76,46
	LABA KOTOR	20.173.000	19.834.270	98,32
	BEBAN/BIAYA :			
	Gaji karyawan	10.980.000	10.341.600	94,19
	Upah pekerja borongan	1.980.000	1.497.200	75,62
	Beban transport	200.000	40.000	20
	Beban angkut	1.095.000	2.950.700	269,47
	Alat tulis kantor	306.000	437.000	142,81
	Kelancaran	400.000	660.000	165,00
	Bunga & Pajak	-	-	-
	Beban listrik	673.000	300.142	44,60
	JUMLAH BIAYA	15.634.000	16.226.642	103,79
3.	LABA BERSIH	4.539.000	3.607.628	79,48

Biaya pada unit usaha saprotan tahun 2019 menunjukkan realisasi sebesar Rp 4.575.000, dari anggaran sebesar Rp 5.984.628, dan selisih sebesar Rp -1.409.628 dengan presentase 130,82 %. Pada tahun 2019 jenis pupuk yang disalurkan mengalami penurunan, hal ini mengakibatkan realisasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga biaya yang dianggarkan oleh KUD tidak efisien dan tidak menguntungkan bagi KUD.

Tabel 6 Rencana Pendapatan Belanja Tahun 2020 Unit Usaha Simpan Pinjam

NO	URAIAN	TAHUN 2019		%
		RENCANA	REALISASI	
1.	PEMBERIAN PINJAMAN	875.000.000	942.929.244	107,8
2.	PENDAPATAN :			
	Bunga pinjaman	85.000.000	78.327.972,86	92,2
	Administrasi	20.000.000	4.926.100,00	26,6
	Lain-lain	4.000.000	13.608.919,62	340,2
	JUMLAH PENDAPATAN	109.000.000	96.862.932,48	88,9
3.	BEBAN/BIAYA :			
	Bunga simpanan	45.000.000	49.229.081,08	109,40
	Gaji karyawan	21.780.000	21.465.000,00	98,55
	Bunga bank	-	-	-
	Alat tulis kantor	1.000.000	1.205.500,00	120,55
	Perjalanan dinas	1.000.000	340.000,00	34,00
	Kelancaran usaha	-	-	-
	Listrik & Telepon	600.000	543.600,00	90,60
	Administrasi, Provisi, & notaris	750.000	-	0,00
	Penyusutan	2.000.000	-	0,00
	JUMLAH BIAYA	72.130.000	72.783.181,08	100,91
4.	LABA BERSIH	36.870.000	24.079.751,40	65,31

Biaya pada unit usaha Simpan Pinjam tahun 2019 menunjukkan realisasi sebesar Rp 36.870.000, dari anggaran sebesar Rp 26.167.353, dan selisih sebesar Rp (10.702.647) dengan presentase 70,98 %. Hal ini dikarenakan para usaha dibidang simpan pinjam semakin banyak , dengan semakin banyaknya, KUD mengalami permasalahan dalam hal ini. KUD memperkuat diri dengan melaksanakan strategi, antara lain dengan meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan manajemen pengelolaan.

Tabel 7 Rencana Pendapatan Belanja Tahun 2020 Unit Usaha Angkutan

	TAHUN 2019		%	NO
	RENCANA	REALISASI	URAIAN	
1.	PENDAPATAN :			
	Truck milik sendiri Truck mitra	93.878.290	102.348.960	109,02
		620.360.000	460.712.000	74,27
	JUMLAH PENDAPATAN	714.238.290	563.060.960	78,83
2.	BEBAN/BIAYA :			
	Upah sopir dsn waker garasi	21.800.290	24.839.784 27.246.846	113,94
	BBM dan pelumas	17.290.000	10.728.000	151,79
	Suku cadang	50.470.000	5.170.000 2.029.500	21,26
	Kelancaran usaha	3.750.000	5.655.000	137,87
	Pajak kendaraan	12.580.000	369.659.420	16,13
	Penyusutan	4.500.000	773.000	125,67
	Ongkos angkut	558.833.000	514.100	66,15
	Alat tulis kantor	500.000	10.757.488	154,60
	Perjalanan dinas	1.000.000	1.988.200	51,41
	Gaji karyawan	18.000.000	30.668.000	59,76
	Rekening listrik GLK/garasi	2.000.000		99,41
	Perbaikan	-	-	-
	JUMLAH BIAYA	691.383.290	490.029.338	70,88
3.	LABA BERSIH	22.855.000	73.031.622	319,54

Biaya pada unit usaha Angkutan tahun 2019 menunjukkan realisasi sebesar Rp 22.855.000, dari anggaran sebesar Rp 38.899.224, dan selisih sebesar Rp 16.044.244 dengan presentase 170,20 %. Dari 2 tahun terakhir pendapatan unit ini mengalami penurunan, dikarenakan kendaraan yang dimiliki KUD mayoritas sudah berusia tua, sehingga biaya operasional dan perawatan cukup tinggi, untuk itu perlu dipertimbangkan untuk peremajaan armada khususnya kendaraan yang berumur tua.

Tabel 8 Rencana Pendapatan Belanja Tahun 2020 Unit Usaha WASERDA

NO	URAIAN	TAHUN 2019		%
		RENCANA	REALISASI	
1.	PENDAPATAN :			
	Penjualan	2.806.500.000	2.655.745.250	94,63
	Pendapatan lain-lain	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.806.500.000	2.655.745.250	94,63
2.	HPP	2.762.925.000	2.614.364.035	94,62
	LABA KOTOR	43.575.000	41.381.215	94,97
3.	BEBAN/BIAYA :			
	Alat tulis kantor	500.000	-	0,00
	Kelancaran usaha	2.000.000	2.355.000	117,75
	Pajak	500.000	175.000	35,00
	Listrik & telepon	1.500.000	1.212.200	80,81
	Gaji karyawan	27.000.000	28.215.000	104,50
	Upah pekerja harian	1.000.000	-	0,00
	Penyusutan	1.100.000	678.400	61,67
	JUMLAH BIAYA	33.600.000	32.635.600	97,13
4..	LABA BERSIH	10.306.000	9.975.000	103,32

Biaya pada unit usaha Warseda tahun 2019 menunjukkan realisasi sebesar Rp 9.975.000, dari anggaran sebesar Rp 10.306.000, dan selisih sebesar Rp -331.000 dengan presentase 103,32 %. permodalan dan persediaan selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penjualan mengalami peningkatan, maka dari itu KUD dapat dikatakan efisien, dikarenakan persediaan sesuai dengan pendapatan.

Tabel 9 Rencana Pendapatan Belanja Tahun 2020 Unit Usaha Jarek Listrik dan Telepon

NO	URAIAN	TAHUN 2019		%
		RENCANA	REALISASI	
1.	PENDAPATAN :			
	Jasa penarikan (collector fee)	52.800.000	37.259.109	70,57
	Pendapatan lain-lain	400.000	300.167	75,05
	Bunga bank	140.000	33.294	23,78
	JUMLAH PENDAPATAN	53.340.000	37.592.581	70,48
2.	BEBAN/BIAYA :			
	Gaji karyawan	13.200.000	10.065.000	76,25
	Perjalanan dinas	1.800.000	1.695.000	94,17
	Alat tulis kantor	720.000	195.500	27,15
	Kelancaran usaha	8.240.000	6.391.700	77,57
	Penyusutan	2.100.000	-	0,00
	Beban listrik dan internet	4.176.000	3.483.400	83,41
	Pajak	180.000	22.500	15,50
	JUMLAH BIAYA	30.416.000	21.853.100	71,85
3.	LABA BERSIH	17.720.062	22.924.000	77,30

Biaya pada unit usaha Jarek Listrik dan Telepon tahun 2019 menunjukkan realisasi sebesar Rp 22.924.000, dari anggaran sebesar Rp 17.720.062, dan selisih sebesar Rp (5.203.938) dengan presentase 77,30 %. Dengan adanya

jenis usaha lainnya seperti usaha layanan pembayaran listrik lewat pulsa dengan teepon, maka KUD mengalami penurunan. Darai penggunaan listrik di wilayah kerja KUD sebanyak 8.068 KK, yang membayar di KUD rata-rata sebanyak 4.933 KK. Sehingga dalam hal ini laba bersih menunjukkan bahwa realisasi melebihi anggaran.

Tabel 10 Rencana Pendapatan Belanja Tahun 2020 Unit Usaha Pelayanan jasa Alsintal

NO	URAIAN	TAH UN 2019		%
		RENCANA	REALISASI	
1.	PENDAPATAN :			
	Jasa tractor	165.000.000	145.231.730	88,02
	Jasa grab loader	75.000.000	66.070.000	88,09
	Jasa dump truck Lain-lain	35.000.000	30.830.000	88,09
		3.000.000	2.572.110	85,74
	JUMLAH PENDAPATAN	278.000.000	244.703.840	88,02
2.	BEBAN/BIAYA :			
	Upah operator	80.200.000	82.949.702	103,43
	BBM dan pelumas	45.870.000	38.409.200	167,01
	Suku cadang	30.000.000	3.950.000	128,03
	Kelancaran usaha	4.000.000	3.035.000	98,75
	Perbaikan	17.500.000	-	34,89
	Pajak dump truck	4.000.000	-	75,88
	Alat tulis	500.000	8.498.500	0,00
	Perjalanan dinas	2.500.000		0,00
	Penyusutan	40.000.000		21,25
	JUMLAH BEBAN	224.570.000	219.556.647	97,77
3.	LABA BERSIH	53.430.000	25.147.193	47,07

Biaya pada unit usaha pelayanan jasa alsintal tahun 2019 menunjukkan realisasi sebesar Rp 25.147.193, dari anggaran sebesar Rp 53.430.000, dan selisih sebesar Rp 28.282.807 dengan presentase 47,07 %. Dengan ini jasa tersebut berjalan dengan lancar, dilihat dari pendapatan dan beban tidak mengalami penurunan, realisasi juga tidak melebihi anggaran.

Tabel 11 Rencana Pendapatan Belanja Tahun 2020 Kelembagaan, Prganisasi & Operasional Kantor

NO	URAIAN	TAHUN 2019		%
		RENCANA	REALISASI	
1.	BIAYA ORGANISASI:			
	RAT	16.000.000	12.237.000	76,48
	Uang kehormatan pengurus,	75.000.000	16.645.000	91,67
	pengawas	22.080.000	9.900.000	75,38
	Gaji karyawan kantor pusat	18.000.000	23.025.000	55,00
	Tunjangan pengurus,	24.000.000	11.247.250	95,94
	pengawas, BPP Tunjangan	10.000.000	4.400.000	112,47
	karyawan	4.800.000	11.000.000	91,67
	Seragam kantor	8.000.000	-	137,50
	Pembinaan	4.000.000	1.360.000	0,00
	Pemeriksaan pengawas,audit	2.000.000	-	68,00
	KAP\	1.200.000		0,00
	Rapat-rapat			
	Perjalanan dinas			
	BBM & Pelumas			
	JUMLAH	185.080.000	158.564.250	85,67

2. BIAYA ADMINISTRASI			
KANTOR :	4.000.000	5.984.900	149,62
ATK& konsumsi	400.000	160.000	40,00
Listrik & Telepon	3.200.000	1.881.608	58,80
Pajak	400.000	107.098	26,77
PBB	4.000.000	4.346.500	6.815.000
Perawatan harta tetap	8.000.000	-	108,66
Kelancaran	1.000.000		85,19
Bunga, Administrasi provisi,& perizinan			0,00
JUMLAH	21.000.000	19.295.106	91,88
3. BIAYA PENYUSUTAN :			
Bangunan	5.000.000	5.000.000	4.379.009
Investaris kantor	4.000.000		6.897.450
Kendaraan			87,58
		600.000	137,95
			15,00
JUMLAH	14.000.000	11.876.459	84,83
4 JUMLAH TOTAL	220.080.000	189.735.815	86,21

Biaya pada unit usaha Kelembagaan Organisasi dan Operasional Kantor tahun 2019 menunjukkan realisasi sebesar Rp189.735.815, dari anggaran sebesar Rp 220.080.000, dan selisih sebesar Rp 30.344.185 dengan presentase 86,21 %. Hal ini disebabkan menurunnya realisasi tiap tahunnya, sehingga biaya anggaran lebih cenderung banyak. Dengan ini biaya-biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran sehingga anggaran realisasi tidak berjalan dengan lancar.

Pemisahan antara biaya-biaya yang terkendali dengan yang tidak terkendali sangat penting untuk menetapkan pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas realisasi dan penyimpangan dari suatu anggaran. Biaya terkendali adalah biaya dimana manajer dapat mempengaruhi ada tidaknya dan besar kecilnya biaya tersebut (Daljano 2009:21). Apabila seorang manajer tidak dapat mempengaruhi suatu biaya memenuhi kebijakannya, maka biaya tersebut merupakan biaya tak terkendali bagi manajer tersebut. Manajemen dapat mengetahui di mana biaya terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab atas realisasi dan penyimpangan pada anggaran biaya. Dengan mengetahui tempat biaya dan penanggungjawab biaya, manajemen akan lebih mudah mengendalikan biaya. Akan tetapi, KUD Sri Tanjung belum melakukan pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali dengan cukup memadai, tidak ada pemisahan antar biaya terkendali dan biaya tidak terkendali yang dilakukan pada anggaran yang dibuat oleh KUD Sri Tanjung. Seharusnya Pemisahan biaya antara biaya terkendali dan tidak terkendali dilakukan sejak awal ditetapkannya anggaran agar nantinya tidak mengalami tanggungjawab ganda terhadap biaya, sehingga nantinya juga dapat mempermudah manajer untuk mengetahui batasan tanggungjawab masing-masing.

Salah satu syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah adanya klasifikasi dan kode rekening. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa KUD Sri Tanjung telah melakukan pengkodean rekening pada setiap transaksi dengan cukup memadai hal ini dapat dilihat pada lampiran. Dimana biaya-biaya dicatat untuk setiap tingkat manajemen, kemudian digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Biaya tersebut harus dipisahkan menjadi biaya terkendali dan tidak terkendali berdasarkan kepentingannya di dalam laporan keuangan dan dalam persiapan pembuatan laporan (Putri, 2005). Klasifikasi dan kode rekening pada KUD Sri Tanjung telah dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban yang terdapat di koperasi. Pengklasifikasikan kode rekening di KUD Sri Tanjung juga bertujuan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Pada KUD Sri Tanjung biaya-biaya dikelompokkan dan digolongkan menggunakan kode angka di setiap transaksinya hal ini gunanya untuk memudahkan setiap tingkatan manajemen untuk menyusun laporan dengan baik yang nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam klasifikasi kode rekening KUD Sri Tanjung telah memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban karena telah melakukan pengkodean tiap biaya berupa angka.

Laporan pertanggungjawaban biaya disajikan untuk memungkinkan setiap manajer melakukan pengelolaan biaya. Laporan ini berisi mengenai biaya-biaya yang dianggarkan, biaya yang sebenarnya dan selisihnya. Laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi pertanggungjawaban (Siregar dkk 2013:185) Dengan demikian, manajer memiliki dasar untuk memantau pelaksanaan anggaran. KUD Sri Tanjung telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran triwulan. Pertanggungjawaban tiap unit usaha, dilakukan oleh masing-masing kepala unit yang nantinya akan melaporkan anggaran dan realisasi yang terjadi pada unit usaha tersebut. KUD Sri Tanjung telah menyajikan jumlah anggaran dan jumlah aktual dari pendapatan

dan biaya yang dianggarkan hal ini karena laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai tolok ukur penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan dalam melaksanakan pengendalian biaya . Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa KUD Sri Tanjung telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa realisasi dari tiap unit-unit usaha yang ada pada KUD Sri Tanjung. Laporan pertanggungjawaban dari realisasi anggaran tiap tahunnya telah tepat sasaran untuk penyajiannya pada pusat pertanggungjawabannya. Dari bagian manajemen yang membuat laporan pertanggungjawaban telah dilakukan beberapa evaluasi dari manajemen atas untuk membuat laporan yang disajikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk melihat hasil dari realisasi anggaran KUD Sri Tanjung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban KUD Sri Tanjung telah memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban karena laporan pertanggungjawaban telah disusun secara periodik dan terarah sesuai wewenang dan tingkatan manajemen.

Berdasarkan Tabel 1, Maka Hasil Penelitian sebagai berikut :

- a. Biaya pada unit usaha pengadaan pangan
Terdapat pada Tahun 2019 dikatakan tidak efisien karena realisasi melebihi anggaran, sehingga tidak menguntungkan. Hal ini dikarenakan tidak berjalan dengan baik pelaksanaan kegiatan pembelian, processing dan lainnya, dan adanya faktor RMU yang tidak melaksanakan kegiatannya karena faktor mesin penggiling padi yang sudah tua maka unit usaha pangan juga tidak dapat beroperasi dengan baik, sehingga unit ini tidak meningkatkan kinerja KUD dalam mengelolah laporan realisasi anggaran dan tidak menguntungkan bagi KUD
- b. Biaya pada unit usaha tebu rakyat
Pada unit ini pelayanan kepada anggota terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas. Pelaksanaan tebang muat dan angkut , berjalan cukup lancar Dengan hal ini pada Tahun 2019 dikatakan efisien karena realisasi tidak melebihi anggaran, sehingga mendapat keuntungan.
- c. Biaya pada unit usaha penggilingan
Pada tahun 2019 faktor mesin kondisinya cukup tua dan kemampuan besaing dibidang usaha pangan belum dikerjakan, namun KUD merealisasikan anggaran tidak melebihi anggaran yang disediakan, sehingga KUD mendapatkan keuntungan dan unit ini dikatakan efisien. Dengan hal ini pada tahun 2019 dikatakan efisien karena realisasi tidak melebihi anggaran, sehingga menguntungkan.
- d. Biaya pada unit usaha saprotan
Pada tahun 2019 jenis pupuk yang disalurkan mengalami penurunan, hal ini mengakibatkan realisasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga biaya yang dianggarkan oleh KUD tidak efisien dan tidak menguntungkan bagi KUD. Dengan hal ini pada tahun 2019 dikatakan tidak efisien karena realisasi melebihi anggaran, sehingga tidak menguntungkan.
- e. Biaya pada unit usaha Simpan Pinjam
Terdapat pada tahun 2019 dikatakan tidak efisien karena realisasi melebihi anggaran, sehingga tidak mendapat keuntungan dan mengalami kerugian sebesar 10.702.647 dengan presentase 80% Hal ini dikarenakan para usaha dibidang simpan pinjam semakin banyak , dengan semakin banyaknya, KUD mengalami permasalahan dalam hal ini. KUD memperkuat diri dengan melaksanakan strategi, antara lain dengan meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan manajemen pengelolaan
- f. Biaya pada unit usaha Angkutan
Terdapat pada Tahun 2019 dikatakan efisien karena realisasi tidak melebihi anggaran, sehingga menguntungkan sebesar 16.034.244 dengan presentase 170,20%. Dari 2 tahun terakhir pendapatan unit ini mengalami penurunan, dikarenakan kendaraan yang dimiliki KUD mayoritas sudah berusia tua, sehingga biaya operasional dan perawatan cukup tinggi , untuk itu perlu dipertimbangkan untuk peremajaan armada khususnya kendaraan yang berumur tua.
- g. Biaya pada unit usaha Warseda
Terdapat tahun 2019 dikatakan efisien karena realisasi tidak melebihi anggaran, sehingga mengalami keuntungan sebesar 331.000 dengan presentase 103,32%. Disebabkan permodalan dan persediaan selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penjualan mengalami peningkatan , maka dari itu KUD dapat dikatakan efisien, dikarenakan persediaan sesuai dengan pendapatan.
- h. Biaya pada unit usaha Jarek Listrik dan Telepon
Pada tahun 2019 dikatakan tidak efisien, karna realisasi melebihi anggaran .Dengan adanya jenis usaha lainnya seperti usaha layanan pembayaran listrik lewat pulsa dengan teepon, maka KUD mengalami penurunan. Darai penggunaan listrik di wilayah kerja KUD sebanyak 8.068 KK, yang membayar di KUD rata-rata sebanyak 4.933 KK
- i. Biaya pada unit usaha Aneka Usaha
Kegiatan unit ini melaksanakan penebusan gula natura dan jasa lainnya, dimana KUD menganggarkan unit ini yang pelaksanaannya pendapatan mengalami penurunan sehingga efisien , Dengan hal ini pada Tahun 2019 dikatakan efisien karena realisasi melebihi anggaran, sehingga menguntungkan.

- j. Biaya pada unit usaha UPJK
Terdapat pada Tahun 2019 dikatakan efisien karena realisasi tidak melebihi anggaran, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar 32.024.871 dengan presentase 161,85%. Hal ini disebabkan biaya yang dikeluarkan KUD mengalami penurunan, maka dari biaya tersebut dianggarkan untuk merealisasi tahun berikutnya dan hasil tersebut realisasi tidak melebihi anggaran, dengan ini pada unit tersebut mendapat keuntungan.
- k. Biaya pada unit usaha Kelembagaan Organisasi dan Operasional Kantor
Tahun 2019 dikatakan efisien karena realisasi tidak melebihi anggaran, sehingga mendapat keuntungan sebesar 30.344.185 dengan presentase 86,21%. Hal ini disebabkan menurunnya realisasi tiap tahunnya, sehingga biaya anggaran lebih cenderung banyak, maka unit ini dikatakan efisien realisasi yang tidak melebihi biaya anggaran dan menguntungkan bagi KUD

Berdasarkan hasil penelitian, KUD Sri Tanjung dalam melakukan efisiensi pengendalian biaya dapat dikatakan kurang efisien, ada beberapa unit terdapat selisih yang tidak menguntungkan, hal ini dapat dilihat dari biaya yang dikeluarkan melebihi biaya yang dianggarkan. Dari 11 unit usaha yang terdapat di KUD Sri Tanjung untuk anggaran dari realisasi tahun 2019 yang efisien hanya 7 unit yaitu Unit Pengadaan Pangan, Unit Semprotan, Unit Angkutan, Unit Waserda/Pertokoan, Unit Pelayanan Jasa Alsintal, Unit Perkembangan Organisasi dan Operasional Kantor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada KUD Sri Tanjung mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban melalui anggaran sebagai alat pengendalian biaya. Disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada KUD Sri Tanjung dilihat dari syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik. KUD Sri Tanjung yang telah memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban adalah struktur organisasi, anggaran, klasifikasi kode rekening dan laporan pertanggungjawaban kecuali pemisahan biaya masih belum memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban. Pengendalian biaya dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dan realisasi yang menghasilkan selisih. KUD Sri Tanjung dalam rangka melakukan efisiensi pengendalian biaya belum dikatakan efisien karena dalam penyusunan anggaran masih terdapat realisasi melebihi anggaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai pelengkap terhadap penelitian yang diberikan yaitu bagi KUD Sri Tanjung diharapkan dalam penyusunan anggaran dapat lebih optimal agar penyusunan anggaran menjadi lebih baik dari sebelumnya. Realisasi yang dikeluarkan juga diharapkan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan, sehingga tidak terjadi selisih yang tidak menguntungkan (unfavorable) yang diakibatkan dari besarnya biaya realisasi yang dikeluarkan dan melebihi biaya yang dianggarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisond (2013), Koperasi Indonesia, Edisi Kedua, Graha Ilmu,
- Daljono. (2009). Akuntansi Biaya: Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- David Doyle(2001). Pengendalian Biaya, PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta.
- Hansen, D. R., Mowen, M.M. (2009). Akuntansi Manajerial. Salemba Empat. Jakarta. Harahap, Sofyan Syafri. (2009). Teori Kritis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendar. (2010). Manajemen Perusahaan Koperasi. Jakarta: Erlangga.
- Hendrojogi. (2012). Koperasi Asas-Asas, Teori dan praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Horngren, C.T.dkk. (2008). Akuntansi Biaya : Sistem Biaya Historis. Penerbit ANDI dan BPFE: Yogyakarta
- Mulyadi. (1997). Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat, dan Rekayasa, Edisi ke-2. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mulyadi. (2002). Auditing, Edisi Kelima, Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, (2005), Akuntansi Biaya, Edisi Kelima, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pecetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Putri, D. (2005). Hubungan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Kinerja Manajer Pusat Investasi (Survei pada Perusahaan Bengkel di Bandung).

Rudianto. (2013). Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengendalian Keputusan Strategi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Siregar, dkk. (2014). Akuntansi Biaya, Edisi 2. Yogyakarta: Salemba Empat.

Suryani & Hendryadi. (2015). Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam. Jakarta: Prenada Media Group.

.